



DISPERKIMTAN
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

*DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI BENGKULU*

**BANTU
RAKYAT**

**BENGKULU
BUMI MERAH PUTIH**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Berkeadilan,
Harmonis, Loyal, Dapat Kolaborasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini bukan sekadar pemenuhan amanat regulasi, melainkan juga bentuk komitmen kelembagaan dalam menghadirkan arah kebijakan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan bagi Provinsi Bengkulu.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2025–2029, yang merupakan tahap awal dari implementasi RPJPD Bengkulu 2025–2045. Dengan demikian, dokumen ini memiliki arti strategis, karena menjadi salah satu fondasi awal dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang “Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sehingga dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kepada Tim penyusun Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu serta pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen ini, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan rasa terima kasih.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam mengawal terwujudnya pembangunan Provinsi Bengkulu yang religius, inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Bengkulu, September 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Bengkulu



IRSAN SETIAWAN, S.H., M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700608 199603 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR..... v

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1. Latar Belakang 6

1.2. Dasar Hukum 7

1.3. Maksud dan Tujuan..... 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....13

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....13

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 33

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 33

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 34

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029.....37

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 39

4.1 Uraian Program..... 39

4.2 Uraian Kegiatan 39

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 40

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah..... 85

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah88

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 90

BAB V PENUTUP 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2021-2024	24
Tabel 3. 1	Permasalahan dan Isu Strategis	37
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2026–2030	38
Tabel 4.1	Daftar Program dan Kegiatan	40
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	65
Tabel 4.3	Definsi Operasional	68
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	83
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	88
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara RPJMD dan Renstra PD	7
Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu	14
Gambar 3.1	Konsep Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2025-2029	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan tahapan krusial dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025– 2029. Renstra ini menjadi pedoman operasional bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan fungsi pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan konsisten, terukur, dan akuntabel.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat strategis, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berperan dalam mengharmoniskan lintas sektor pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak hanya merupakan dokumen internal kelembagaan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti mandat politik pembangunan hasil Pilkada serentak 2024 yang berakar dari aspirasi masyarakat.

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 sendiri merupakan tahapan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045, yang memiliki visi besar *“Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”* Pada periode lima tahun pertama, RPJMD menetapkan visi *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan”* dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan nilai religiusitas dalam pembangunan, serta keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selain itu, arah pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”* Hal ini menuntut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk memastikan pembangunan daerah tidak hanya konsisten dengan RPJMD, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan nasional.

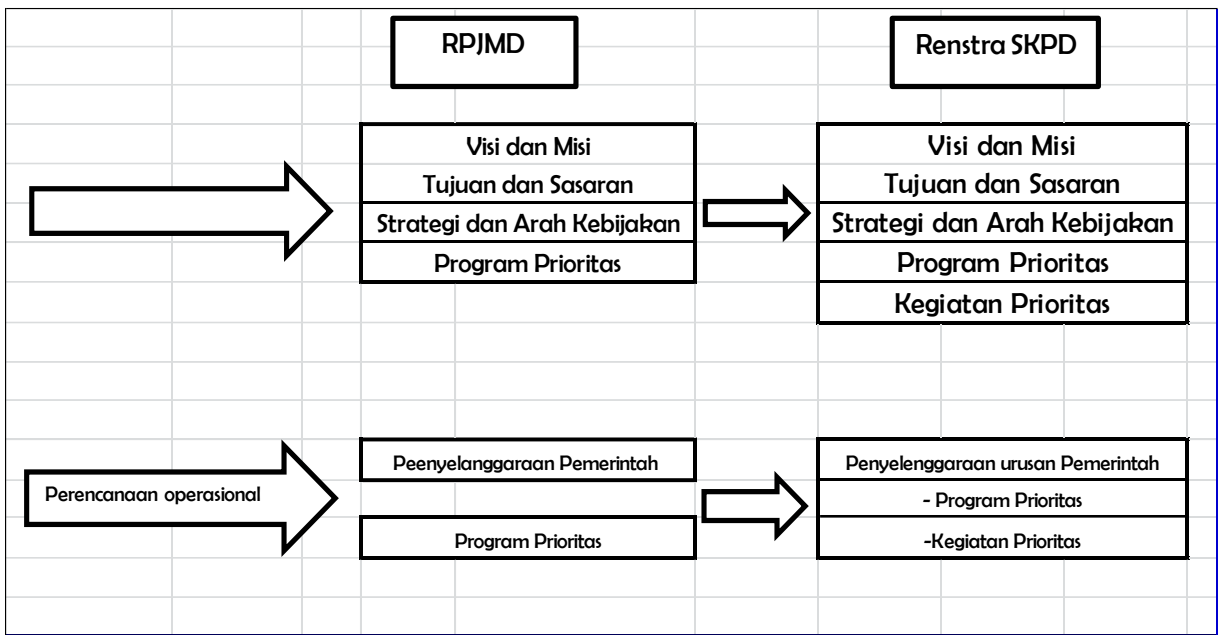
Dalam kerangka tersebut, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diarahkan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berbasis data, evidence-based, serta mendorong penguatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai motor penggerak pembangunan.

Kondisi aktual pembangunan Bengkulu menunjukkan adanya tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, rendahnya nilai tambah ekonomi, kapasitas kelembagaan yang perlu ditingkatkan, serta perlunya tata kelola pembangunan yang lebih adaptif. Namun demikian, Bengkulu juga memiliki peluang besar berupa kekayaan sumber daya alam, letak geografis strategis di jalur Samudera Hindia, serta berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui Renstra ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan mampu merespons tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang dengan memperkuat konsistensi perencanaan, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dalam kebijakan publik. Dengan demikian, Renstra berfungsi tidak hanya sebagai dokumen teknokratis, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang adaptif terhadap dinamika global seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan transformasi sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis ganda: pertama, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memastikan keterpaduan pembangunan daerah dengan arah RPJMD, RPJPD, dan RPJMN; dan kedua, sebagai instrumen adaptif untuk mewujudkan pembangunan yang religius, inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju *Indonesia Emas 2045*.

Gambar 1.1 menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra PD.



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam jangka menengah. Renstra ini merupakan instrumen penting yang menghubungkan antara visi, misi, dan agenda pembangunan Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dengan peran kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025–2029 juga berperan sebagai instrumen akuntabilitas publik yang memastikan arah pembangunan dapat dipahami, dipantau, dan dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, partisipasi, serta keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025–2029 adalah mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yakni *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”* Melalui dokumen ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diarahkan untuk memainkan peran kunci dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Renstra ini juga menjadi wahana untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis data, sekaligus mewujudkan sinergi antara visi daerah dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”* Secara lebih rinci, penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025– 2029 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan daerah dengan menyusun dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang sistematis, berbasis data, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antar sektor dan antar level pemerintahan, baik lintas perangkat daerah, antar kabupaten/kota dengan provinsi, maupun dengan kebijakan pembangunan nasional.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah melalui prioritas pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, guna memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memperkuat mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, sehingga capaian program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diukur secara objektif serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan berikutnya.
- e. Menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan kerja antar unit dan peningkatan profesionalisme aparatur.
- f. Memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi jangka panjang pembangunan Provinsi Bengkulu sesuai RPJPD 2025–2045, yakni *“Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,”* serta mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025–2029 diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang lebih profesional, partisipatif, dan berdaya saing, sehingga Provinsi Bengkulu dapat tumbuh menjadi daerah yang maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan. Dokumen ini bukan sekadar pedoman teknis, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk mengukur kinerja, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan mencerminkan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, hingga program pembangunan. Dokumen ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai landasan filosofis, yuridis, dan operasional yang menjadi dasar penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bab II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, serta sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Selain itu, disajikan kinerja pelayanan, capaian standar pelayanan minimal (SPM) sesuai tupoksi, kelompok sasaran layanan, serta mitra kerja yang terlibat. Pada bagian akhir, diuraikan pula permasalahan pelayanan dan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode Renstra 2025– 2029 sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029. Selain itu, bab ini juga memuat strategi pencapaian tujuan serta arah kebijakan perangkat daerah yang akan dijalankan selama periode lima tahun.

Bab IV: Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan secara lebih operasional mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dilengkapi dengan kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Selain itu, dijelaskan pula keterkaitan sub kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah serta target capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V: Penutup

Bab terakhir memuat kesimpulan substantif dari keseluruhan dokumen Renstra, termasuk kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2025–2029 dapat memberikan arah yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, baik oleh internal organisasi maupun pemangku kepentingan pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Kedudukan dan Tugas Pokok

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tipologi B, artinya memiliki peran strategis dan ruang lingkup kerja yang cukup luas. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam struktur pemerintahan daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkedudukan sebagai unsur wajib pelayanan dasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Pasal 543 Pergub 21/2024, tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah: *“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pembangunan infrastruktur dasar.”*

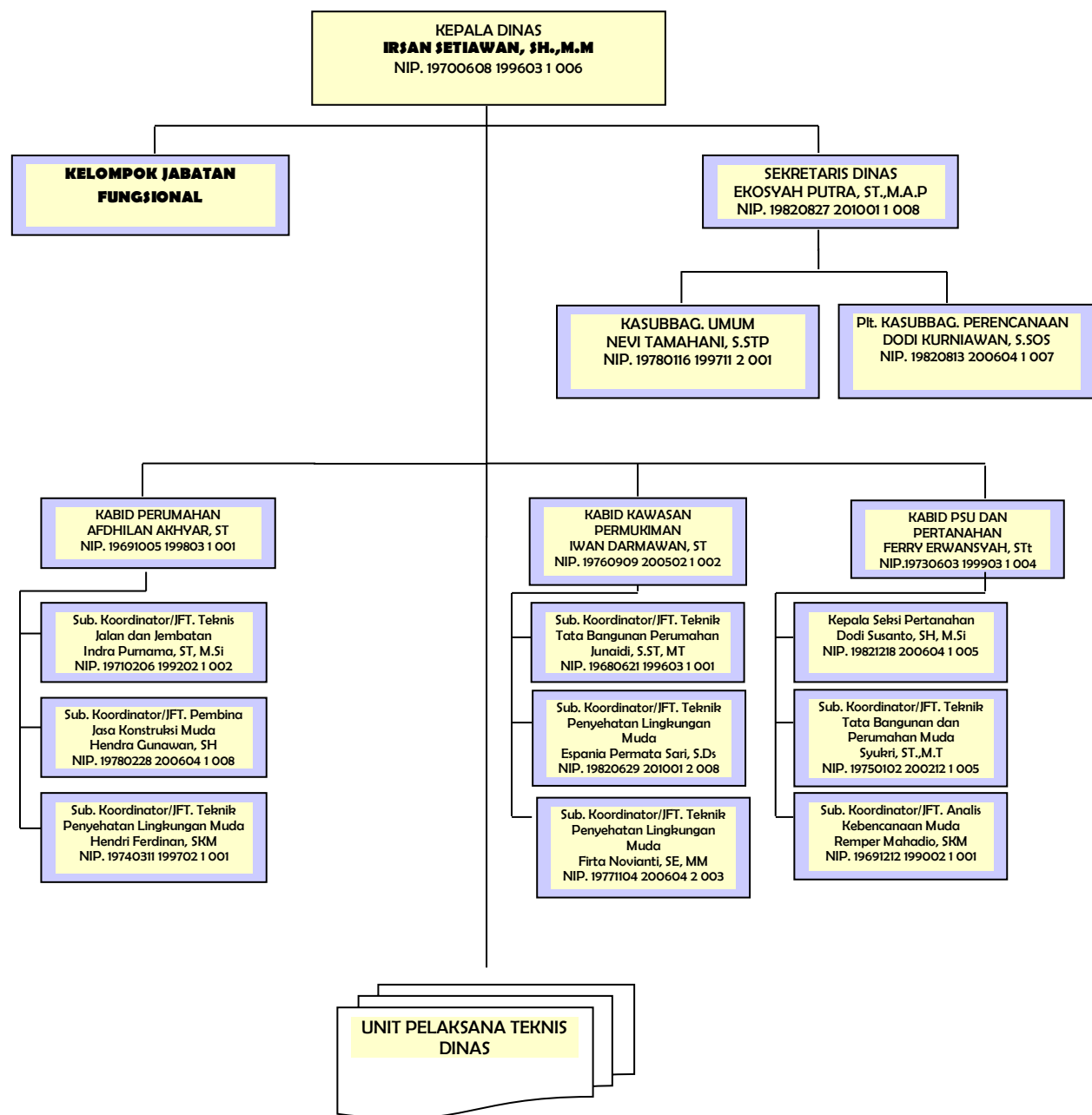
b. Fungsi Utama

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta Pertanahan.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta pertanahan.
- 3) Pengordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta pertanahan.
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta pertanahan.
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta pertanahan.
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta pertanian.
- c. Struktur Organisasi

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu



Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu berdasarkan Pergub 21/2024 terdiri atas:

1) Kepala Dinas

- o Pemimpin tertinggi yang mengoordinasikan seluruh fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2) Sekretariat

- o Subbagian Umum dan Perlengkapan
- o Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat berfungsi memberikan dukungan administrasi umum, perencanaan internal, keuangan, dan pengelolaan sumber daya aparatur.

3) Bidang Perumahan

- o Tim Kerja Perencanaan dan Pendataan
- o Tim Kerja Penyediaan dan Pelaksanaan
- o Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4) Bidang Kawasan Permukiman

- o Tim Kerja Pendataan dan Perencanaan
- o Tim Kerja Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
- o Tim Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian

Bidang ini fokus pada pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

5) Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) dan Pertanahan

- o Seksi Pertanahan
- o Tim Kerja Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi
- o Tim Kerja Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan.

Bidang ini membidangi penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang Prasaran, Sarana, Utilitas Umum (PSU) Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Terdiri atas pejabat fungsional perencana, peneliti, perekayasa, analisis keuangan daerah & pusat, pranata komputer, arsiparis dan JFT lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjukkan desain kelembagaan yang komprehensif dan lintas sektor. Bidang-bidang yang ada tidak hanya mencakup dimensi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur sebagai penggerak utama pembangunan.

Dengan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki posisi strategis sebagai:

- Integrator: menyatukan rencana pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.
- Evaluator: mengawal konsistensi antara dokumen perencanaan dan hasil pembangunan.
- Inovator: mendorong kebijakan dan solusi berbasis riset dan teknologi.

Kelembagaan ini selaras dengan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Bengkulu 2025–2029, yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis data, riset, dan inovasi untuk mewujudkan visi *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”*

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Sebagai lembaga yang menangani pelayanan infrastruktur dasar daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituntut memiliki aparatur yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Jumlah dan komposisi SDM yang diuraikan dalam Renstra ini menggambarkan kondisi aktual pada saat dokumen Renstra 2025–2029 disusun, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi pengembangan kapasitas aparatur untuk periode lima tahun mendatang.

Berdasarkan rekapitulasi kepegawaian, jumlah ASN di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu adalah 52 orang dengan sebaran sebagai berikut:

1) Berdasarkan Golongan

Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu didominasi oleh pegawai pada Golongan III yang berjumlah

36 orang. Komposisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada tingkat menengah dalam struktur kepangkatan ASN. Pegawai pada golongan ini umumnya sudah memiliki pengalaman kerja yang memadai serta berada pada fase produktif untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap tugas-tugas perencanaan, riset, dan inovasi daerah.

Sementara itu, terdapat 6 orang pegawai pada Golongan IV, yang umumnya menempati posisi lebih senior baik dari sisi masa kerja maupun pengalaman teknis maupun manajerial. Kehadiran pegawai di golongan ini sangat penting dalam memberikan arahan, pembinaan, dan supervisi terhadap pegawai yang berada di bawahnya. Namun jumlah pegawai di golongan ini relatif masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan organisasi, sehingga menjadi catatan tersendiri untuk ke depan dalam upaya mendorong percepatan karier pegawai potensial agar dapat mencapai jenjang golongan IV.

Di sisi lain, pegawai pada Golongan II hanya berjumlah 3 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekrutan pegawai dengan golongan awal semakin berkurang, yang bisa jadi disebabkan oleh kebijakan rekrutmen ASN yang lebih banyak menerima formasi dengan kualifikasi pendidikan sarjana. Walaupun jumlahnya kecil, pegawai di golongan ini tetap memiliki kontribusi, khususnya dalam pekerjaan teknis pendukung. Namun, dengan komposisi yang kecil tersebut, ke depan dibutuhkan strategi pembinaan dan peningkatan kapasitas agar mereka dapat segera naik ke golongan yang lebih tinggi sehingga lebih efektif dalam mendukung tugas kelembagaan.

Secara umum, distribusi pegawai menurut golongan ini memperlihatkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki basis pegawai yang kuat di tingkat menengah, namun masih perlu memperkuat jenjang senior (golongan IV) untuk menjamin keberlanjutan kepemimpinan dan keahlian strategis. Di sisi lain, jumlah pegawai di golongan awal (II) yang sangat terbatas juga menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kesenjangan regenerasi dalam jangka panjang.

No	Unit Kerja/Bagian	PNS (Orang)	Honorar (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Bidang Sekretariat	20	7	27
2	Bidang Perumahan	8	-	8
3	Bidang Kawasan Permukiman	8	-	8
4	Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum dan Pertanahan	16	-	16
JUMLAH		52	7	59

2) Berdasarkan Pendidikan

Jika ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu menunjukkan dominasi kuat pada lulusan Strata 1 (S1) yang berjumlah 35 orang. Jumlah ini menggambarkan bahwa sebagian besar pegawai telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan analisis, perencanaan, dan penyusunan kebijakan pembangunan. Keberadaan pegawai dengan kualifikasi S1 menjadi fondasi penting karena pada level ini mereka umumnya memiliki kemampuan konseptual yang memadai serta keterampilan teknis yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Selain itu, terdapat 13 pegawai dengan pendidikan Strata 2 (S2) yang. Hal ini merupakan modal besar karena pegawai dengan kualifikasi S2 umumnya memiliki spesialisasi tertentu, baik di bidang perencanaan, ekonomi, kebijakan publik, maupun disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan pembangunan daerah. Adanya lulusan S2 mencerminkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih mendalam, yang sangat diperlukan dalam menghadapi kompleksitas isu pembangunan daerah, seperti integrasi perencanaan lintas sektor, analisis big data, maupun penyusunan dokumen strategis jangka panjang dan menengah.

Untuk kategori pendidikan di bawah sarjana, jumlahnya relatif kecil. Tercatat hanya terdapat 4 orang lulusan SLTA. Komposisi ini menunjukkan bahwa struktur pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan saat ini sangat didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi, sedangkan tenaga pendukung dengan pendidikan menengah dan diploma semakin berkurang.

Walaupun jumlahnya sedikit, pegawai dengan pendidikan SLTA tetap memiliki peran penting terutama dalam mendukung fungsi teknis dan administratif. Namun demikian, untuk efektivitas jangka panjang, dibutuhkan program pengembangan kapasitas seperti pendidikan lanjutan atau pelatihan agar kompetensi mereka dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan organisasi.

Secara keseluruhan, distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mencerminkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu memiliki SDM yang relatif berkualitas tinggi dengan dominasi lulusan S1 dan S2. Tantangan ke depan adalah bagaimana memaksimalkan peran pegawai dengan kualifikasi S2 sebagai agen perubahan. Sambil tetap memberikan ruang pembinaan bagi pegawai dengan pendidikan menengah dan diploma agar dapat berkembang dan berkontribusi lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga.

GOLONGAN				PENDIDIKAN (ORANG)						
I	II	III	IV	SD	SM P	SMA	D3	D4	S1	S2
-	3	36	13	-	-	4	-	-	35	13
Jumlah				52						

3) Berdasarkan jenis kelamin Jika dilihat dari komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu memiliki jumlah pegawai yang relatif berimbang. Dari total 52 pegawai, terdapat 36 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan gender di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan cukup baik, bahkan cenderung memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dominasi jumlah pegawai perempuan mencerminkan adanya pergeseran positif dalam struktur organisasi pemerintahan, di mana perempuan tidak hanya berperan sebagai tenaga pendukung, tetapi juga aktif dalam fungsi strategis seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian kebijakan publik. Fakta bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat perspektif gender dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan prinsip pengarusutamaan gender (PUG) yang menjadi salah satu mandat

nasional maupun internasional.

Sementara itu, keberadaan 36 pegawai laki-laki tetap menjadi komponen penting karena mereka juga mendominasi beberapa posisi teknis dan manajerial tertentu. Keseimbangan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan dapat mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih dinamis, kolaboratif, dan representatif terhadap kebutuhan masyarakat secara luas.

Namun demikian, meskipun proporsi gender relatif seimbang, tantangan yang perlu diperhatikan adalah pemerataan kesempatan karier antara laki-laki dan perempuan. Keseimbangan kuantitas tidak otomatis menjamin keseimbangan kualitas, terutama dalam hal penempatan jabatan fungsional maupun struktural. Oleh karena itu, pada periode Renstra berikutnya perlu dipastikan adanya kebijakan internal yang mendorong kesetaraan akses pengembangan karier, pelatihan, dan promosi jabatan bagi semua pegawai tanpa membedakan gender.

Dengan kondisi ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu memiliki peluang untuk menjadi contoh lembaga pemerintah daerah yang tidak hanya mendorong profesionalisme, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender dalam tata kelola organisasinya.

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	IV	10	4
2	III	23	12
3	II	3	-
4	I	-	-
JUMLAH		36	16

- 4) Berdasarkan jabatan fungsional tertentu (JFT)
- Komposisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu juga dapat ditinjau dari sisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang melekat pada ASN. Data menunjukkan adanya variasi jabatan fungsional yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas teknis dan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- Secara keseluruhan, struktur JFT di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu sudah relatif lengkap, namun distribusi jenjang karier masih perlu ditingkatkan.

Penekanan pada pengembangan perencana madya dan utama, peningkatan kapasitas peneliti ke jenjang lebih tinggi, serta penguatan peran JFT lainnya akan menjadi langkah strategis dalam memastikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mampu menjalankan mandat pembangunan infrastruktur dasara secara profesional, modern, dan akuntabel.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Ketersediaan sarana fisik dan peralatan kerja yang memadai sangat menentukan kelancaran proses perencanaan pembangunan, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar, serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Data sarana dan prasarana berikut merupakan kondisi aktual pada saat penyusunan Renstra 2025–2029, sehingga menjadi gambaran awal kebutuhan penguatan sarpras ke depan.

1) Gedung dan Ruang Kantor

Saat dokumen ini disusun, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu memiliki 3 unit gedung kantor yang menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembangunan.

a) Gedung 1 (Utama)

- Terdiri dari 2 lantai.
- Menjadi pusat layanan administrasi dan ruang kerja bagi sebagian besar bidang.
- Memiliki 1 ruang rapat besar berkapasitas 20 orang. Ruang rapat ini dimanfaatkan untuk koordinasi internal, pembahasan teknis, serta forum konsultasi terbatas.

b) Gedung 2

- Terdiri dari 1 lantai.
- Digunakan sebagai ruang kerja tambahan bagi bidang-bidang teknis.

c) Gedung 3 (Ruang Kepala Dinas)

- Terdiri dari 1 lantai.
- Digunakan sebagai ruang kerja Kepala Dinas dan Ruang Rapat.

Analisis Kebutuhan ke Depan

- a) Aksesibilitas: Gedung yang ada belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Ke depan, perlu didesain ulang dengan penambahan fasilitas seperti *ramps*, toilet difabel, dan jalur evakuasi yang sesuai standar universal design.
- b) Kapasitas Parkir: Lahan parkir yang ada saat ini belum memadai untuk menampung kendaraan ASN, tamu undangan, maupun peserta kegiatan besar. Perlu perluasan atau penataan ulang area parkir agar lebih representatif.
- c) Pemanfaatan Ruang: Masih terdapat ruang-ruang yang belum termanfaatkan secara optimal. Ke depan, ruang tersebut dapat direnovasi dan difungsikan untuk kebutuhan strategis, seperti:
 - o Ruang Arsip untuk mendukung pengelolaan dokumen perencanaan.

Dengan kondisi tiga gedung yang dimiliki saat ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan relatif memiliki sarana fisik yang memadai untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun dan mengawal pembangunan daerah, diperlukan renovasi, optimalisasi pemanfaatan ruang, serta penambahan fasilitas baru. Prioritas penguatan ke depan adalah membangun ruang rapat besar dengan kapasitas minimal 100 orang, memperluas fasilitas parkir, serta memastikan gedung ramah disabilitas. Upaya ini akan menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan lebih siap dalam melaksanakan koordinasi, konsultasi publik, dan forum pembangunan infrastruktur secara inklusif dan efektif.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam lima tahun terakhir merupakan cerminan dari efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi penting untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan perencanaan ke depan agar lebih terarah dan berbasis pada hasil nyata.

Tabel berikut menyajikan gambaran capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama periode lima tahun sebelumnya, yang mencakup indikator utama kinerja perangkat daerah. Data ini memberikan potret mengenai keberhasilan yang telah dicapai maupun tantangan yang masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas pada periode Renstra 2025–2029.

Evaluasi kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu periode 2021–2024 disusun berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra sebelumnya. Tabel yang disajikan menggambarkan target dan realisasi kinerja pada tiap tahun, sehingga dapat terlihat tren perkembangan capaian dari waktu ke waktu. Namun demikian, perlu dicatat bahwa untuk tahun 2025, saat dokumen ini disusun, realisasi indikator kinerja belum tersedia karena nilai resmi dari Kementerian PANRB maupun lembaga terkait belum diterbitkan. Oleh karena itu, evaluasi dalam dokumen ini hanya mencakup capaian hingga tahun 2024. Selain itu, dikarenakan walaupun periode Renstra sebelumnya Adalah 2021-2026, implikasi Pilkada serentak di Tahun 2024, seluruh Renstra di Perangkat Daerah di mulai tahun 2025 mengikuti periode RPJMD .

Tabel 2. 1 Evaluasi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2021-2024

No.	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target 2021-2026						Realisasi			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Nila Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	BB
2	Persentase Rumah Layak Huni	53.57	57.16	59.07	61.16	63.07	65.16	0	0.1	0.1	0.1
3	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	460,41	440,41	430,41	410,31	390.41	370,41	0	1.8	10.9	10.9
4	Prosentase Penanganan Luas kawasan Kumuh	4,34	4,54	4,65	4,87	5,12	5.40	0	0	11,57	11,57
5	Persentase Kecamatan yang dibangun PSU	22,66	24,22	27,34	32,03	36,72	42,19	0	0	11,57	11,57

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu selama periode Renstra sebelumnya (2021–2026) yang dievaluasi hanya hingga 2024, menunjukkan perkembangan yang umumnya positif meskipun masih terdapat sejumlah kesenjangan antara target dan realisasi. Evaluasi kinerja didasarkan pada lima indikator utama, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP, Persentase Rumah Layak Huni, Luas Kawasan Kumuh (Ha), Persentase Penanganan Luas Kawasan Kumuh, dan Persentase Kecamatan yang dibangun PSU.

Target yang dicapai sampai dengan periode akhir renstra belum maksimal di karenakan beberapa faktor yaitu :

1. Bencana COVID 19 yang mengakibatkan adanya Refocussing Anggaran
2. Minimnya Struktur Pembagian Anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman terkhusus pada Kegiatan Fisik.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyusun, mengoordinasikan, serta mengawal kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sasaran layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersifat langsung kepada masyarakat umum.

a. Pemerintah Daerah (Internal)

- Gubernur dan Wakil Gubernur → sebagai penerima layanan utama dalam bentuk dokumen (PERDA RP3KP, SK Kumuh, laporan kinerja).
- Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi → mendapatkan layanan berupa sinkronisasi perencanaan, harmonisasi program, serta fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- Unit Pelaksana Teknis dan biro di bawah Pemprov → menerima arahan teknis dan dukungan koordinasi dalam perencanaan serta evaluasi program kerja.

b. Pemerintah Kabupaten/Kota

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi menjadi mitra koordinasi bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen (RP3KP, SK Kumh), sinkronisasi pembangunan lintas wilayah, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.
- Kabupaten/kota juga menjadi sasaran layanan dalam program pembinaan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas pembangunan daerah.

c. Pemerintah Pusat dan Lembaga Vertikal

- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian/lembaga sektoral lainnya merupakan sasaran layanan dalam bentuk laporan, data, dan dokumen pembangunan daerah yang harus terintegrasi dengan sistem nasional.
- Lembaga vertikal di Bengkulu (BPPW, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman).

d. Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan

- Dunia usaha dan asosiasi bisnis menjadi sasaran layanan dalam rangka penyediaan informasi pembangunan daerah, potensi investasi.

e. Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Penelitian

- Perguruan tinggi di Bengkulu maupun nasional menjadi mitra strategis dalam penyusunan kajian, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah.

f. Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas

- Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, komunitas, serta forum warga menjadi sasaran layanan melalui mekanisme partisipasi publik, seperti FGD, konsultasi publik, dan forum diskusi kebijakan.

g. Masyarakat Umum

- Masyarakat secara luas merupakan sasaran akhir dari seluruh program dan kebijakan pembangunan.

Dengan memperhatikan seluruh kelompok sasaran layanan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diharapkan dapat memainkan peran optimal sebagai penggerak koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan daerah. Dengan demikian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mampu menjadi motor penggerak terwujudnya pembangunan Provinsi Bengkulu yang maju, religius, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan arah RPJMD 2025–2029 serta visi RPJPD 2025–2045.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaahan visi-misi RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga, analisis lingkungan strategis, serta laporan KLHS RPJMD 2025–2029, beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu antara lain:

a. Kualitas Pembangunan Daerah Belum Optimal

Sebagai institusi yang memegang peran strategis dalam menyusun, mengoordinasikan, serta mengawal pembangunan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dituntut untuk menghadirkan dokumen yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman substantif bagi seluruh perangkat daerah. Namun demikian, hasil evaluasi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2020–2024, ditambah temuan survei internal dan eksternal, menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum memenuhi ekspektasi.

Hal ini terlihat dari belum tercapainya target nilai komponen perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta masih sering ditemukannya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan, baik RPJPD, RPJMD, RKPD, maupun Renstra OPD. Kondisi ini menimbulkan risiko duplikasi program, inkonsistensi prioritas pembangunan, serta rendahnya efektivitas belanja daerah karena tidak seluruhnya diarahkan untuk mencapai sasaran strategis.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah juga masih menghadapi tantangan dalam integrasi isu lintas sektor seperti kemiskinan, lingkungan, gender, ketahanan pangan, hingga transformasi digital. Kualitas indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan juga masih bervariasi; sebagian belum terukur dengan jelas, tidak konsisten antar dokumen, serta belum sepenuhnya berbasis data.

Akar permasalahan dari kondisi tersebut terutama disebabkan oleh koordinasi lintas OPD yang belum efektif sehingga masih muncul ego sektoral dalam penyusunan perencanaan. Integrasi data pembangunan juga belum berjalan optimal baik dari sisi ketersediaan, keandalan, maupun pemutakhiran. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan masih cenderung administratif, sekadar memenuhi aturan penyusunan dokumen, dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *evidence-based planning*. Di samping itu, kapabilitas ASN dalam menyusun dokumen perencanaan masih belum merata, sehingga menghasilkan kualitas yang berbeda antar perangkat daerah.

Dampak dari berbagai persoalan tersebut cukup signifikan. Kualitas dokumen perencanaan yang rendah membuat arah program pembangunan menjadi kurang fokus, sulit dievaluasi secara objektif, dan tidak sepenuhnya mampu menjawab isu strategis pembangunan.

Akibatnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah maupun antar sektor berpotensi melebar karena prioritas pembangunan tidak terintegrasi dengan baik. Lebih jauh, kondisi ini juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap dokumen perencanaan, yang sering kali dipersepsikan hanya sebagai kewajiban formal, bukan instrumen manajemen pembangunan yang sesungguhnya.

Evaluasi Renstra periode 2020–2024 memperkuat temuan ini, di mana sejumlah indikator kinerja utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, termasuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan capaian nilai SAKIP daerah, belum berhasil mencapai target. Evaluasi internal mengonfirmasi lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah serta kurang optimalnya pemanfaatan data yang valid dan mutakhir sebagai penyebab utama. Sementara itu, survei internal menunjukkan bahwa ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih menghadapi kendala dalam integrasi data lintas bidang serta kesulitan menetapkan indikator kinerja yang terukur. Survei eksternal kepada pemangku kepentingan juga menegaskan masih rendahnya pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya konsistensi dokumen perencanaan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyelesaian permasalahan ini tidak dapat dilakukan hanya dengan perbaikan teknis, melainkan memerlukan penguatan struktural dan kelembagaan. Ke depan, diperlukan langkah- langkah strategis berupa penguatan koordinasi lintas OPD melalui forum perencanaan yang lebih partisipatif, peningkatan kapasitas ASN dalam penyusunan dokumen berbasis *evidence-based planning*, integrasi sistem informasi pembangunan dan data sektoral untuk menjamin konsistensi dan akurasi, serta pembentukan budaya kerja berbasis kinerja sehingga dokumen perencanaan dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang substantif dan efektif.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi Masih Terbatas

Dalam era transformasi digital yang semakin cepat, pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based*). Namun, hasil evaluasi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2020–2024,

survei internal, serta kajian lingkungan strategis menunjukkan bahwa pemanfaatan TI dalam mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, evaluasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu masih terbatas.

Keterbatasan ini tampak pada beberapa aspek. Pertama, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun sistem aplikasi perencanaan dan evaluasi daerah belum sepenuhnya optimal. Proses input data, pengolahan, serta analisis masih sering terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh wilayah. Kedua, integrasi data sektoral dari perangkat daerah lain masih lemah, sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kerap menghadapi keterlambatan maupun inkonsistensi data dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Akar permasalahan kondisi tersebut bersumber dari beberapa faktor. Keterbatasan anggaran untuk infrastruktur digital membuat pengembangan sistem informasi berjalan lambat. Di sisi lain, kapasitas dan jumlah SDM bidang TIK masih terbatas sehingga pemeliharaan maupun pengembangan aplikasi belum dapat berjalan optimal. Selain itu, budaya kerja berbasis digital belum sepenuhnya terbentuk, karena sebagian pegawai masih terbiasa menggunakan cara manual. Tantangan lainnya adalah belum adanya integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah, di mana masing-masing OPD cenderung mengembangkan aplikasi sendiri yang tidak terhubung secara baik, sehingga potensi *Satu Data Indonesia* belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Dampaknya sangat terasa terhadap kualitas pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Proses penyusunan dokumen perencanaan sering tertunda karena data tidak tersedia secara *real-time*. Evaluasi dan pelaporan pembangunan pun belum mampu menggambarkan kondisi aktual secara akurat. Kesempatan untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperkuat riset, inovasi, serta pelayanan publik juga belum tergarap optimal. Bahkan, risiko duplikasi program dan inefisiensi semakin besar karena lemahnya sistem monitoring yang seharusnya dapat ditopang oleh teknologi.

Hasil evaluasi Renstra 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah diimplementasikan, tingkat pemanfaatannya masih rendah. Banyak data yang tidak terisi lengkap atau tidak diperbarui secara berkala, sehingga analisis pembangunan tidak sepenuhnya valid. Seperti contoh, target indikator subkegiatan seringkali diabaikan, sehingga target capaian tidak terdokumentasi di SIPD dengan baik, walaupun dalam Renja sudah dituangkan. Indikator terkait implementasi sistem informasi pembangunan

juga belum mencapai target yang ditetapkan. Survei internal terhadap ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memperkuat temuan ini, di mana keterbatasan kapasitas pegawai dalam mengoperasikan aplikasi TI menjadi hambatan utama. Sementara itu, survei eksternal dari stakeholder, perguruan tinggi, dan masyarakat menunjukkan bahwa akses publik terhadap data pembangunan daerah masih sulit, sehingga transparansi informasi belum terwujud maksimal. Permasalahan pemanfaatan TI ini bersifat fundamental dan mendesak untuk segera ditangani, terutama mengingat arah pembangunan nasional 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi digital, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu ditempuh antara lain adalah penguatan infrastruktur digital berupa jaringan, server, dan perangkat pendukung; peningkatan kapasitas ASN di bidang TIK melalui pelatihan maupun penugasan khusus; integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah dengan pendekatan *Satu Data Indonesia*; pemanfaatan *big data* dan analitik digital untuk mendukung perencanaan berbasis bukti; serta pengembangan budaya kerja digital agar seluruh pegawai terbiasa bekerja dengan data *real-time* dan sistem aplikasi yang terintegrasi.

c. Tata Kelola dan Koordinasi Lintas OPD Belum Maksimal

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta infrastruktur pendukung yang memadai merupakan faktor kunci dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu. Namun, hasil evaluasi Renstra periode 2020–2024, survei internal-eksternal, serta analisis data kepegawaian dan sarana prasarana menunjukkan bahwa kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Dari sisi SDM, meskipun jumlah aparatur relatif mencukupi, distribusi kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional belum merata. ASN dengan latar belakang pendidikan di bidang perencanaan, riset, dan inovasi masih terbatas, sehingga beban kerja strategis sering terpusat pada individu tertentu. Selain itu, kompetensi teknis pejabat fungsional perencana dalam memanfaatkan teknologi perencanaan modern, analisis berbasis data, dan integrasi lintas sektor masih bervariasi.

Sementara itu, dari sisi infrastruktur, kondisi sarana dan prasarana kerja masih standar dan belum memadai untuk mendukung tugas koordinasi lintas OPD. Gedung kantor belum sepenuhnya ramah disabilitas, kapasitas ruang rapat relatif kecil dibandingkan kebutuhan, dan fasilitas teknologi informasi masih terbatas.

Kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung yang kuat adalah prasyarat untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi: penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi, renovasi gedung kantor agar lebih representatif, inklusif, dan dilengkapi ruang rapat besar; peningkatan infrastruktur TIK berupa perangkat keras dan lunak pendukung; serta perencanaan sarana prasarana jangka panjang yang sistematis.

3. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan salah satu analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukantelaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Perumahan

- Belum optimalnya penanganan korban bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni;
- Belum Optimalnya pendataan korban bencana baik setelah maupun sebelum terjadinya bencana;
- Belum Optimalnya pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana provinsi

2. Isu Strategis Bidang Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha
- Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kawasan permukiman bangunan pengaman sungai untuk pengendali banjir;
- Perlu adanya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha;

3. Isu Strategis Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Pertanahan

- Perlu adanya perencanaan yang baik dalam penyediaan PSU permukiman;
- Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU permukiman;
- Belum optimalnya penyelesaian sengketa tanah garapan;
- Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 adalah *“Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan.”* Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi utama yang ditetapkan adalah *Misi 2: Meningkatkan Indeks Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Konektivitas Wilayah.*

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2025–2029 disusun untuk menjawab berbagai tantangan strategis yang dihadapi, yaitu kualitas perencanaan yang belum optimal, pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas, lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta keterbatasan SDM dan infrastruktur pendukung. Sejalan dengan tantangan tersebut, tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah:

“Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dengan dukungan tata kelola perangkat daerah yang profesional dan akuntabel.” Tujuan ini sepenuhnya sejalan dengan Misi 2 RPJMD, karena menekankan aspek infrastruktur, akuntabilitas, pemanfaatan IPTEK, serta profesionalisme tata kelola pemerintahan. Sinergi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sasaran ditetapkan sebagai arah kerja yang terukur bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu dalam mendukung pembangunan daerah secara konsisten, efektif, dan berbasis bukti. Sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan, sekaligus memastikan keterkaitan dengan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan;
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2 :

Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
- b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3:

Menyelenggarakan pembangunan dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
- b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.

Tujuan 4:

Menyelenggarakan pembangunan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;

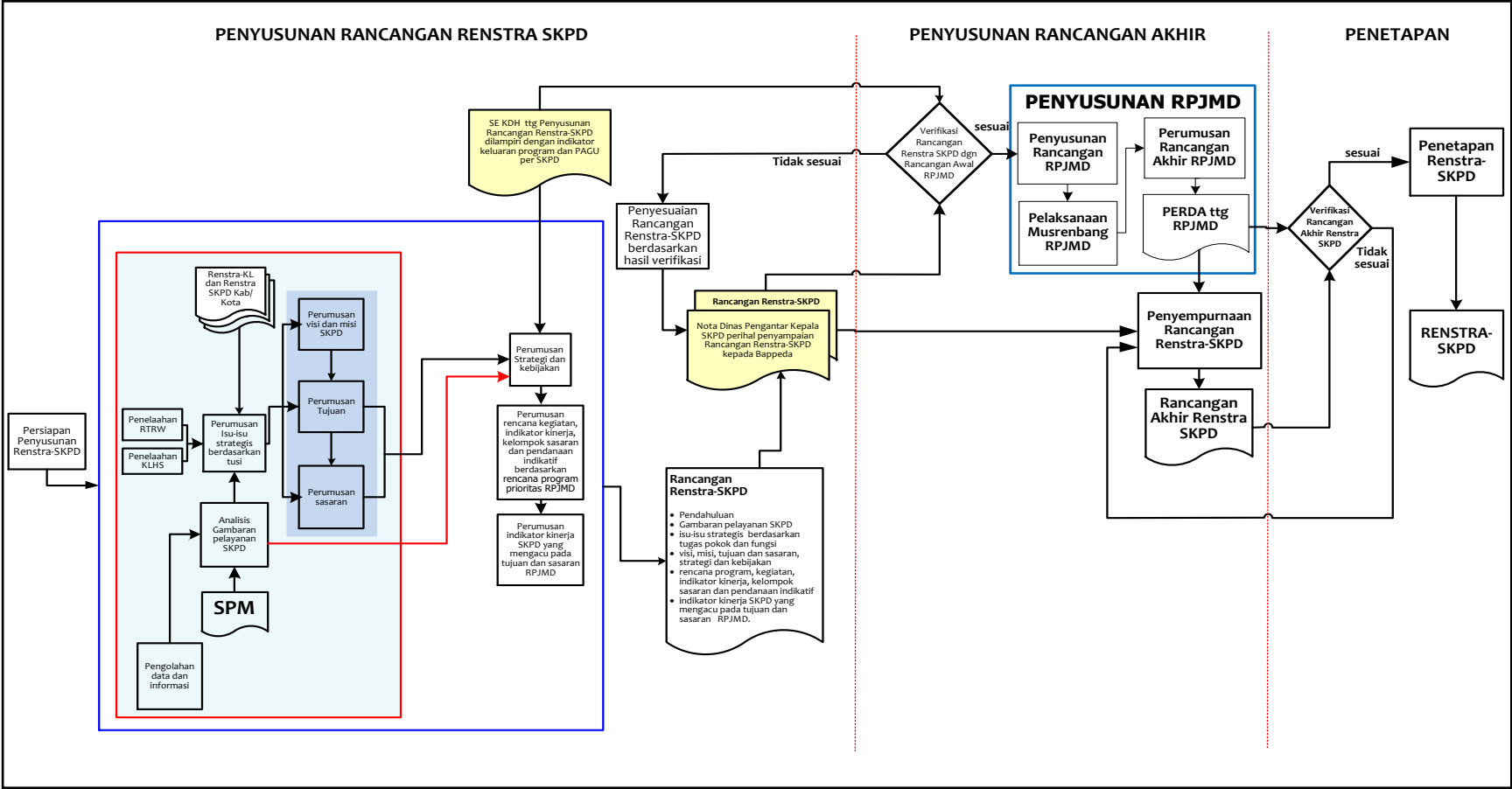
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Tujuan 5:

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2025-2029



3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025- 2029

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikator kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan Tahun 2025 – 2030. Adapun Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dapat dirumuskan pada tabel **3.1** di bawah ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	1. Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan 3. Pengurangan kawasan kumuh 4. Pengembangan prasarana, sarana dan utilitas 5. Peningkatan Penyelesaian Sengketa tanah garapan	1. Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni 2. Penanganan rumah menuju sehat dan berwawasan lingkungan 3. Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana alam dan program pembangunan 4. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan 5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perumahan

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2026–2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Fondasi: Fokus pada konsolidasi data pembangunan, penyelarasan perencanaan dengan RPJMD, serta penguatan koordinasi awal lintas OPD.	Konsolidasi & Kapasitas: Penekanan pada peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan riset untuk kebijakan, dan penguatan tata kelola melalui sistem informasi perencanaan.	Integrasi & Akselerasi: Menguatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan wilayah, serta mempercepat implementasi inovasi pembangunan.	Optimalisasi & Evaluasi: Memaksimalkan kinerja pembangunan infrastruktur dasar, memperluas kolaborasi dengan mitra pembangunan; serta memperkuat mekanisme evaluasi capaian sasaran.	Konsolidasi Capaian & Keberlanjutan: Memantapkan hasil sasaran Renstra, menyusun rekomendasi kebijakan untuk periode berikutnya, serta menjamin keberlanjutan pembangunan menuju RPJPD 2025–2045.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Propinsi Bengkulu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dapat melaksanakan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik, upaya pelembagaan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh unsur pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat yang berkepentingan dibidang perumahan dan permukiman, baik berada ditingkat nasional, regional maupun lokal.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan menengah OPD.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				8.434.274.500, 00		10.197.694.500 ,00		11.211.194.500 ,00		12.933.194.500 ,00		13.538.194.500 ,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.534.274.500, 00		8.717.694.500, 00		8.851.194.500, 00		9.622.194.500, 00		9.708.194.500, 00		
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77	80	7.534.274.500, 00	80	8.717.694.500, 00	85	8.851.194.500, 00	85	9.622.194.500, 00	90	9.708.194.500, 00	1.04.2.10.0.00.01. 00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000,00		280.000.000,00		305.000.000,00		384.730.000,00		485.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	100	0	150.000.00 0,00	100	280.000.00 0,00	100	305.000.00 0,00	100	384.730.00 0,00	100	485.000.00 0,00		
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	87,08	100		100		100		100		100			

[illegible]

			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	99,80	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00		
1.04.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.639.274.500,00		7.137.994.500,00		7.276.194.500,00		7.577.464.500,00		7.787.464.500,00		
Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100	6.639.274.500,00	100	7.137.994.500,00	100	7.276.194.500,00	100	7.577.464.500,00	100	7.787.464.500,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97,53	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	95,20	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	80	100		100		100		100		100			
1.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.533.194.500,00		6.982.994.500,00		7.121.194.500,00		7.397.464.500,00		7.607.464.500,00		
Tersedianya Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	97,53	100	6.533.194.500,	100	6.982.994.500,	100	7.121.194.500,	100	7.397.464.500,	100	7.607.464.500,		

Tunjangan ASN	Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)			00		00		00		00		00		
1.04.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				56.080.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	80	100	56.080.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00		
1.04.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00		
1.04.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	95,20	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00		
1.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		70.000.000,00		
BIDANG URUSAN /		BASELI	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026	2027	2028	2029	2030							

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	NE TAHUN 2024	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen/Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	25.000.00 0,00	100	35.000.00 0,00	100	40.000.00 0,00	100	40.000.00 0,00	100	70.000.00 0,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	95,45	100				100				100			
1.04.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		55.000.00 0,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	55.000.00 0,00		
1.04.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				25.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.00 0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	95,45	100	25.000.000,00	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.00 0,00		
1.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		125.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		125.000.00 0,00		
Dokumen/Laporan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	100	125.000.00 0,00	100	25.000.00 0,00	100	25.000.00 0,00	100	125.000.00 0,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0				100				0			

1.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		100.000.00 0,00		
Kelengkapannya														
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	100	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	100	100.000.00 0,00		
1.04.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.00 0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendjdikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.00 0,00		
1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				320.000.000,00		480.000.000,00		540.000.000,00		595.000.000,00		690.000.00 0,00		
Dokumen/Laporan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	98,70	100	320.000.00 0,00	100	480.000.00 0,00	100	540.000.00 0,00	100	595.000.00 0,00	100	690.000.00 0,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	99,81	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	99,95	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	99,53	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16,67	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	99,94	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN /		BASELI	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026	2027	2028	2029	2030							

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	NE TAHUN 2024	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	99,65	100		100		100		100		100			
1.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	99,95	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	80.000.000,00	100	85.000.000,00		
1.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	99,81	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.04.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	98,70	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00		
1.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	16,67	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00		
1.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	99,53	100	25.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	60.000.000,00		
1.04.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	99,65	100	5.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
1.04.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	100	10.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	99,94	100	150.000.000,00	100	190.000.000,00	100	190.000.000,00	100	200.000.000,00	100	230.000.000,00		
1.04.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /	INDIKATOR OUTCOME /	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU	TARGE	PAGU		

KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	OUTPUT	2024	ET		T		T		T		T			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				0,00		109.700.000,00		265.000.000,00		450.000.000,00		50.730.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Dokumen/Laporan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	99,52	0	0,00	100	109.700.00 0,00	100	265.000.00 0,00	0	450.000.00 0,00	0	50.730.00 0,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	99,90	0				0		0					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)						100		100					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0				100		100					
1.04.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		80.000.000,00		400.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0,00		0,00	100	80.000.000,00	100	400.000.000,00		0,00		
1.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	99,90	0	0,00	0	0,00	100	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		50.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		50.730.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.730.000,00		
1.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		59.700.000,00		60.000.000,00		0,00		0,00		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	99,52	0	0,00	100	59.700.000,00	100	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00				
1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00				
Dokumen/Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	92,23	100	300.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	87,25	100				100				100					
1.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	87,25	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00				
1.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	92,23	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00				
1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000,00		200.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00				
BIDANG URUSAN /		BASELI	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN													
			2026	2027	2028	2029	2030									

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	NE TAHUN 2024	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen/Laporan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	50.000.000,00	100	200.000.000,00	100	150.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	100											
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100											
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100											
1.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	0,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		50.000.000,00		0,00		75.000.000,00		0,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	0,00	100	75.000.000,00	100	0,00		
1.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100	0,00	100	50.000.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				225.000.000,00		80.000.000,00		235.000.000,00		461.000.000,00		520.000.000,00		
Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	2,05	7,19	225.000.000,00	8	80.000.000,00	9	235.000.000,00	11	461.000.000,00	12	520.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				25.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		120.000.000,00		140.000.000,00		
Dokumen	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	0	25.000.000,00	90	60.000.000,00	100	80.000.000,00	100	120.000.000,00	100	140.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	0	100		100		100		100					
				TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	0		100		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	0		100		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	0	0		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	0	0		0		100		100		100			
1.04.02.1.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				0,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	0	0,00	90	10.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00		
1.04.02.1.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	0	0	0,00	100	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00		
	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	0	0		0		0		100		0			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	0	0		0		0		100		100			
1.04.02.1.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		0,00		
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	15.000.000,00	0	0,00		
1.04.02.1.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan				0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		35.000.000,00		

Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	15.000.000,00	100	35.000.000,00		
1.04.02.1.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan				0,00		0,00		0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00		
1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				200.000.000,00		0,00		135.000.000,00		251.000.000,00		260.000.000,00		
Unit Rumah	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	200.000.000,00	0	0,00	100	135.000.000,00	100	251.000.000,00	100	260.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0				0		100		0			
	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	100				0		100		100			
1.04.02.1.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				200.000.000,00		0,00		95.000.000,00		161.000.000,00		200.000.000,00		

Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	100	200.000.000,00	0	0,00	100	95.000.000,00	100	161.000.000,00	100	200.000.000,00		
1.04.02.1.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				0,00		0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	0	0	0,00	0	0,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	60.000.000,00		
1.04.02.1.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi				0,00		0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	50.000.000,00	0	0,00		
1.04.02.1.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		
Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	0	0	0,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.04.02.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan	0	0	0,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00		

	Perumahan (Laporan)													
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				525.000.000,00		850.000.000,00		1.075.000.000,00		1.600.000.000,00		1.750.000.000,00		
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	2,05	7,19	525.000.000,00	8	850.000.000,00	9	1.075.000.000,00	10	1.600.000.000,00	10	1.750.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.03.1.01 - Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				25.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		200.000.000,00		
Dokumen/Laporan	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	0	0	25.000.000,00	100	100.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	200.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	0	100				100							
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	0	0		100		100		0		100			
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0		100		0		100		100			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	0	0		100		100		100		100			

1.04.03.1.01.0008 - Penyusunan/Review/Leg alisasi Kebijakan Bidang PKP				0,00		25.000.000,00		15.000.000,00		0,00		25.000.000,00		
Tersusun/Tereview/Terlegal isasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	15.000.000,00	0	0,00	100	25.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03.1.01.0017 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				25.000.000,00		0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (Laporan)	0	100	25.000.000,00		0,00	100	25.000.000,00		0,00		0,00		
1.04.03.1.01.0018 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.04.03.1.01.0019 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				0,00		25.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		

Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	25.000.000,00		
1.04.03.1.01.0020 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				0,00		25.000.000,00		0,00		15.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0	0,00	100	25.000.000,00	0	0,00	100	15.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.04.03.1.02 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				500.000.000,00		750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.525.000.000,00		1.550.000.000,00		
Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)	0	0	500.000.000,00	100	750.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.525.000.000,00	0	1.550.000.000,00		
	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	0	0				100							
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai	100	100				100		100					

	dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)													
1.04.03.1.02.0003 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				500.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	2026 PAGU	TARGET	2027 PAGU	TARGET	2028 PAGU	TARGET	2029 PAGU	TARGET	2030 PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	100	100	500.000.000,00	100	650.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	900.000.000,00		
1.04.03.1.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh	0	0	0,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	0	0,00		

Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Laporan)													
1.04.03.1.02.0014 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				0,00		0,00		0,00		525.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar (Ha)	0	0	0,00	0	0,00	100	0,00		525.000.000,00		650.000.000,00		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				150.000.000,00		550.000.000,00		1.050.000.000,00		1.250.000.000,00		1.560.000.000,00		
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	32,03	42,19	150.000.000,00	43	550.000.000,00	44	1.050.000.000,00	45	1.250.000.000,00	46	1.560.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	4,69	5,46		6		7		8		9			
1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				150.000.000,00		550.000.000,00		1.050.000.000,00		1.250.000.000,00		1.560.000.000,00		
Dokumen	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	100	150.000.000,00	100	550.000.000,00	100	1.050.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.560.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	100		100		100		100		100			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	0	0		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	0	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	0		100		100		100		100			
1.04.05.1.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				100.000.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	0	100	100.000.000,00	100	70.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
1.04.05.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				0,00		70.000.000,00		100.000.000,00		660.000.000,00		860.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	0	0	0,00	100	70.000.000,00	100	100.000.000,00	100	660.000.000,00	100	860.000.000,00		

1.04.05.1.01.0004 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	0	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.04.05.1.01.0008 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				25.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	100	25.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.04.05.1.01.0009 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman				0,00		310.000.000,00		650.000.000,00		240.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0	0	0,00	100	310.000.000,00	100	650.000.000,00	100	240.000.000,00	100	350.000.000,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				50.000.000,00		250.000.000,00		320.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	97,53	100	50.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	210.000.000,00	100	220.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.04.1.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		220.000.000,00		
Laporan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus	0	0	50.000.00	100	200.000.00	100	200.000.00	100	210.000.00	100	220.000.00		

	Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Berita Acara)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	0	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.04.1.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.00 0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	0	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.00 0,00		
2.10.04.1.01.0006 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.00 0,00		
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Berita Acara)	0	0	0,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	120.000.00 0,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK				0,00		50.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.00 0,00		

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2029

PEMBANGUNAN														
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				0,00		50.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.00 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.05.1.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				0,00		50.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	100	50.000.000,00	0	120.000.000,00	100	130.000.000,00	0	130.000.000,00		
	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	0	0		0		100		100		100			
2.10.05.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Dokumen)	0	0	0,00	100	50.000.000,00	0	50.000.000,00	100	50.000.000,00	0	50.000.000,00		
2.10.05.1.01.0003 - Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				0,00		0,00		70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00		

Tabel 4. 2 Definsi Operasional

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
- Meningkatnya indeks infrastruktur dasar	Meningkatkan Indeks Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Konektivitas Wilayah				Indeks Pembangunan Infrastruktur (Angka)		
					Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
					Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)		
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni			Persentase rumah layak huni (%)		
					Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)		
					Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas		
					Luas Kawasan Kumuh (%)		
					Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)		
Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029							

Terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
		Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.1.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.1.01.0002 - Identifikasi Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.1.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.1.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01.0008 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana (Dokumen)	1.04.02.1.01.0009 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana (Dokumen)	Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

				Laporan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi (Dokumen)	1.04.02.1.01.0011 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang)	1.04.02.1.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (Orang)	1.04.02.1.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
						Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Unit Rumah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.1.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau	1.04.02.1.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.1.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.1.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.1.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.1.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	

				Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	1.04.02.1.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan (Laporan)	1.04.02.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
					Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggara n PSU Permukiman	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggara an PSU Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggara an PSU Permukiman	
					Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggara an PSU Permukiman	
					Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.1.01 - Urusan Penyelenggara an PSU	

						Permukiman	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman (Dokumen)	1.04.05.1.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman (Laporan)	1.04.05.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.1.01.0004 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.1.01.0008 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
					Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.1.01.0009 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah Yang efektif dan efisien			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.04.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial	

					(Data)	Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.04.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.04.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Dokumen/Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen/Laporan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.04.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen/Laporan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.04.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen/Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.04.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Dokumen/Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen/Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	1.04.01.1.09.0006 - Pemeliharaan	

					Dipelihara (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas RPJMD	Outcome RPJMD	Program Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kegiatan & Subkegiatan Pendukung	Keterangan
Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatkan indeks infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah	Program Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman Kumuh, Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umu serta Pertanahan	Kegiatan: Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Kegiatan: Peningkatan Kualitas Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni serta Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan: Penyediaan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum Kegiatan: Penyelesaian Permasalahan Sengketa Pertanahan	Menjamin konsistensi dokumen, integrasi data, serta penguatan pengendalian & evaluasi pembangunan

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2025–2029 sangat ditentukan oleh sejauh mana perangkat daerah mampu mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Alat ukur tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu berfungsi sebagai indikator makro yang menunjukkan capaian strategis lembaga dalam mendukung pencapaian misi pembangunan daerah. IKU ini bersifat representatif karena mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, bukan hanya output administratif semata.

Penetapan IKU mengacu pada beberapa prinsip:

1. Relevansi – indikator dipilih sesuai dengan mandat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam bidang pembangunan infrastruktur, serta tata kelola perangkat daerah.
2. Keterukuran – indikator dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan data yang tersedia dan dapat diverifikasi.
3. Konsistensi – indikator selaras dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Bengkulu, serta indikator kinerja pembangunan nasional.
4. Keterpaduan – indikator mencerminkan keterhubungan antarprogram, sehingga capaian setiap kegiatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sejalan dengan hal tersebut, IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2025–2029 ditetapkan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran Renstra, yang sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja jangka menengah.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
2.	Persentase rumah layak huni	%	61,16	63,07	65,16	66	67,10	68	69	
3.	Luas Kawasan Kumuh	%	4,87	5,12	5,40	6	7	8	9	
4.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Nilai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pada SAKIP	Angka	77	80	80	80	85	90	90	

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada setiap perangkat daerah. Melalui IKK, dapat dilakukan pemantauan sejauh mana pelayanan publik dan kinerja urusan pemerintahan daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki IKK tersendiri

Dengan demikian, peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap IKK strategis, yaitu:

1. Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU.
2. Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
4. Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
2.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		%	32,03	36,72	42,19	43	44	45	46	
3.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	komulatif	%	4,69	4,69	5,46	6	7	8	9	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	77	80	80	80	85	85	90	
5.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
6.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	komulatif	Indeks	0	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu serta dijadikan acuan dalam evaluasi dan laporan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Lima Tahunan. Keterpaduan arah dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Bengkulu dan target – target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu untuk lima tahun kedepan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berbasis pada pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama harus dapat dilembagakan secara berlanjut sampai pada tingkat komunitas lokal, dan didukung secara efektif oleh sistem wilayah/regional dan sistem pusat dan di daerah.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan melaksanakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu 2025 - 2029 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, September 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Dan Pertanahan Provinsi Bengkulu



IRSAN SETIAWAN, SH.,M.M
NIP. 19700608 199603 1 006